

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PEMANDIAN ALAM BANYU BIRU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Taufiq Soeltanto¹, Nurul Laila², Yuni Hartono³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Email: tsoeltanto@gmail.com

Abstrak

Objek wisata pemandian alam menjadi salah satu potensi yang signifikan dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru telah berjalan cukup baik dilihat dari dampak positifnya yaitu: berupa bangunan fisik, sumberdaya dan kondisi ekonomi lokal yang meningkat setiap tahunnya, namun terdapat beberapa dampak yang membuat pelaksanaannya masih belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan panggung atraksi, keamanan jalan menuju wisata pemandian alam Banyu Biru dan tidak ada angkutan umum yang menuju ke objek wisata tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan peluang kerja. Namun, perlu adanya perhatian yang lebih baik terhadap aspek lingkungan, pengembangan SDM dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Kebijakan; Pengembangan Banyu Biru; Ekonomi Lokal

Abstract

Natural bathing tourism objects are one of the significant potentials in the development of tourism in an area. The purpose of this study is to evaluate the policy of developing Banyu Biru natural bathing tourism objects and their impact on improving the economy of local communities. This research uses qualitative and quantitative analysis methods by collecting data through surveys, interviews, and field observations. The results showed that the policy of developing Banyu Biru natural bathing tourism objects has been running quite well in terms of its positive impacts, namely: in the form of physical buildings, resources and local economic conditions that increase every year, but there are several impacts that make its implementation still not optimal, especially in the use of attraction stages, road security to Banyu Biru natural bathing tourism and no public transportation to the tourist attraction. Based on the results of the policy evaluation of the development of Banyu Biru natural bathing tourist attraction, it can be concluded that this policy has succeeded in improving the economy of the local community through increasing the number of tourists, increasing income, and increasing job opportunities. However, there needs to be better attention to environmental aspects, human resource development and innovation to ensure the sustainability of sustainable tourism development and have a positive impact on local communities.

Keywords: Policy; Blue Banyu Development; Local Economy

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan dengan tujuan pengembangan obyek wisata adalah proses pembangunan yang memiliki efek pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Dengan menjadikan objek wisata yang ada di daerah diharapkan akan meningkatkan potensi kunjungan wisata, dengan hadirnya wisatawan di diharapkan akan menghasilkan perputaran ekonomi karena kehadiran wisatawan akan meningkatkan perputaran uang dibawah.

Demikian juga yang dilakukan Pemda Kabupaten Pasuruan yang memiliki objek wisata menarik dikunjungi yaitu pemandian alam Banyubiru yang berada didesa sumberejo kecamatan winongan kabupaten pasuruan.

Pemandian Banyu Biru merupakan salah satu pemandian di Kabupaten Pasuruan yang terkenal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga melakukan berbagai upaya dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur.

Tempat wisata banyubiru telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerah terutama pada sector ekonomi, masyarakat disekitar objek wisata , yang dapat mengembangkan sector usaha yang berhubungan dengan objek wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Evaluasi kebijakan pengembangan Wisata Pemandian Alam Banyubiru.
2. Aktor kebijakan dalam pengembangan Wisata Pemandian Alam Banyubiru.
3. Menguraikan dampak pengembangan wisata Pemandian Alam Banyu biru bagi masyarakat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Iskandar (2012) Kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian rencana program, aktivitas, aksi keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak.

Berdasarkan pendapat tersebut, Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk

mencapai tujuan-tujuan di masyarakat dimana penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Adapun jenis kebijakan publik menurut Suharno (2010) : Kebijakan Substantif, Kebijakan Distributif, Kebijakan Materil, Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum.

Sedangkan aktor kebijakan publik, pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Aktor kebijakan publik meliputi: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Instansi Administrasi Kelompok Kepentingan, Partai Politik, Warga Negara (individu). Adapun Aktor Kebijakan Publik di Indonesia: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Pemerintah (Presiden sebagai kepala pemerintahan, Menteri, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Direktorat Jendral, Badan-Badan Negara lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten), Kepala Desa, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD).

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2008), apabila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

Evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, tepat guna dan tepat arah maka perlu mengikuti langkah-langkah evaluasi yaitu: Menyusun rencana evaluasi, menghimpun data, melakukan verifikasi, mengolah dan menganalisis, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, tindak lanjut evaluasi.

Pemerintah Daerah

Menurut Suhady dalam Riawan (2009) Pemerintah ditinjau dari pengertiannya adalah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat

dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pariwisata

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pasuruan Bab 1 Pasal 1 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Mathieson dan Wall dalam Pitana dan Gyatri (2005), Pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya, kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapa fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berupa kegiatan yang sementara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencari keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Adapun bentuk-bentuk pariwisata menurut Spillane (1987), Bentuk-bentuk pariwisata meliputi Pariwisata Individu dan Kolektif, Pariwisata Jangka Panjang Pariwisata Jangka Pendek dan Pariwisata Ekskursi, Pariwisata Jangka Pendek atau *Short Term Tourism*, Pariwisata dengan Alat Angkutan, Pariwisata Aktif dan Pasif.

Jenis-jenis pariwisata menurut Spillane (1987), Jenis pariwisata sebagai berikut: Pariwisata untuk menikmati perjalanan, Pariwisata untuk Rekreasi, Pariwisata untuk kebudayaan, Pariwisata untuk olahraga, Pariwisata untuk urusan usaha dagang.

Beberapa jenis wisata diatas dapat diketahui dalam melakukan wisata harus melihat sesuai dengan alasan dan motivasi dalam melakukan perjalanan wisatanya.

Selain menimbulkan dampak positif

terhadap perekonomian, sektor pariwisata juga memiliki dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri, berikut dampak positif dan negatif pariwisata terhadap ekonomi:

- a) Dampak Positif menurut Yoeti (2008): Dapat menciptakan kesempatan membuka usaha, dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, meningkatkan pendapatan nasional, mendorong peningkatan investasi, memperkuat neraca pembayaran.
- b) Dampak negatif menurut Mathieson dan Wall dalam Pendit (2002): Ketergantungan terhadap wisata, meningkatkan angka inflasi, meningkatnya inpor baha-bahan yang diperlukan, sifat pariwisata yang musiman, timbulnya biaya-biaya tambahan.

Pemerintah diharapkan mampu mencari solusi –solusi dari dampak negatif yang dihasilkan dari pariwisata tersebut contohnya terkait ketergantungan pada sektor pariwisata yang terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan suatu efek negatif apabila suatu saat terdapat isu-isu ataupun insiden yang membuat jumlah wisatawan yang berkunjung menurun. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata. Faktor pendorong pengembangan pariwisata menurut Fandeli (1995) dalam Soebagyo (2012), faktor yang mendorong manusia berwisata adalah:

- a. Keinginan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota, keinginan untuk mengubah suasana dan memanfaatkan waktu senggang.
- b. Kemajuan pembangunan dalam bidang komunikasi dan transportasi.
- c. Keinginan melihat dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru mengenai budaya masyarakat dan di tempat lain.

- d. Meningkatnya pendapatan yang dapat memungkinkan seseorang dapat dengan bebas melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya.

Sedangkan faktor penghambat pariwisata:

Faktor internal, misalnya dalam pengembangan destinasi wisata, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengembangkan potensi wisata, kurangnya lahan untuk dikembangkan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

Faktor eksternal, dukungan dari pemerintah yang belum maksimal membuat pengembangan pariwisata terhambat, misalnya seperti akses jalan yang rusak hingga saat ini belum diperbaiki, ketersediaan listrik yang belum memadai. Hal tersebut tentunya akan menjadi penghambat perjalanan wisatawan yang akan berkunjung.

Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Munir (2007) Pengembangan Ekonomi Lokal adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat bersama dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM.

Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal:

- a) Terlaksananya percepatan pengembangan ekonomi.
- b) Terbangun dan berkembangnya kemitraan.
- c) Terbangunnya sarana dan prasarana.
- d) Terwujudnya pengembangan UKM
- e) Peningkatan PAD dan PDRB.
- f) Peningkatan Pendapatan masyarakat.
- g) Peningkatan pemerataan antar kelompok
- h) Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Ekonomi Lokal:

Faktor pendukung menurut Blakely, 1984

dalam Supriyadi (2007), yaitu: Perluasan kesempatan kerja, perluasan untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah.

Pengembangan Ekonomi Lokal memiliki tujuan yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah
2. Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja
3. Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah a tau negara lain
5. Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antardaerah.

Sedangkan pendukung dan penghambat ekonomi lokal, menurut Blakely, 1984 dalam Supriyadi (2007), yaitu :

- 1) Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
- 2) Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
- 3) Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran
- 4) Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal .

Dalam mencapai sebuah keberhasilan pengembangan, selain ada faktor pendukung tentunya juga akan menemukan berbagai hambatan. Untuk hal ini, faktor pendukung juga bisa menjadi penghambat dalam sebuah pengembangan ekonomi lokal apabila semua unsur tersebut tidak terwujud dengan baik atau tidak tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wisata Banyu Biru dilihat dari: Model kebijakan dan Cakupan evaluasi

- b. Aktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Wisata Banyu Biru: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Koordinator wisata pemandia alam Banyu Biru,
- c. Faktor Penghambat, dalam pengembangan wisata pemandian alam Banyu Biru terdapat faktor penghambat internal dan eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan pembangunan merupakan Langkah awal penentu arah pelaksanaan pembangunan untuk menghindari gagalnya dan tidak sesuainya antara input, output dan outcome, hal tersebut juga terjadi dalam proses pembangunan pengembangan objek wisata Banyu Biru. Dengan adanya pembangunan jalan dapat mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut.

Pengembangan yang diupayakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, seperti sarana dan prasarana yang berupa perbaikan jalan, toilet umum, tempat parkir, rumah makan atau warung, perbaikan pentas pertunjukan. Selain pengembangan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga melakukan pengembangan non fisik, dengan cara Promosi pariwisata seperti promosi lewat website dan media cetak.

Perencanaan pengembangan kawasan wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik daya tarik wisata. Diperlukan usaha serta kemauan yang keras untuk menjadikan objek wisata ini menjadi salah satu tujuan destinasi pariwisata yang paling ingin dikunjungi. Upaya dalam rangka pengembangan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar memerlukan suatu pengembangan pariwisata yang terpadu dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana secara mendalam.

Dilihat dari pendapatan pemandian alam Banyu Biru di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pembangunan dan

pengembangan destinasi wisata Pemandian Alam Banyu Biru lebih di fokuskan pada Desa Sumber Rejo Kecamatan Winongan. Karena lokasi pemandian alam Banyu Biru berada di desa tersebut.

Aktor pelaksana kebijakan yang paling berpengaruh besar terhadap pengembangan Kawasan Wisata Pemandian Alam Banyu Biru antara lain:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, selaku pemerintah daerah berperan besar dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan dalam bidang kepariwisataan. Mempunyai tugas menyusun rencana dan program untuk pengembangan Kawasan Wisata Pemandian Alam Banyu Biru.
- b. Koordinator wisata pemandian alam Banyu Biru, tugas pengelola wisata pemandian alam Banyu Biru sebagai pembantu tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melakukan pengelolaan diwisata pemandian alam Banyu Biru.
- c. Penduduk sekitar kawasan Pemandian Alam Banyu Biru, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk proses berjalannya evaluasi kebijakan pengembangan agar dapat berjalan secara optimal. Penduduk sekitar kawasan wisata mempunyai potensi dan peluang apabila mereka dibina dengan baik maka bisa membantu proses berjalannya kebijakan pengembangan kawasan wisata.

Faktor Penghambat dalam pengembangan wisata pemandia alam Banyu Biru, peneliti mendapatkan penghambat pengembangan yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal dari penghambat pengembangan yaitu kantor yang belum terlalu luas dan tingkat kebersihan area kebun di wisata pemandian alam Banyu Biru masih kurang.
- b. Faktor Eksternal, Kurangnya keamanan disepanjang jalan memasuki kecamatan winongan menuju kawasan wisata Pemandian alam Banyu Biru,

dikarenakan jalan yang sepi sehingga banyak jambret dan menyebabkan pengunjung takut berkendara sendiri naik motor kecuali ramai dan naik mobil.

Sedangkan dampak evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sektor pariwisata akan memberikan suatu dampak bagi perekonomian masyarakat. Begitu pula dengan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan ini, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan membuat beberapa kebijakan untuk mengembangkan kawasan wisata Pemandian Alam Banyu Biru. Beberapa dampak sudah mulai terlihat. Melihat kondisi fakta dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan merealisasikan pengembangan atau pembangunan fisik, baik itu di area wisata pemandian alam Banyu Biru maupun sekitar wisata pemandian alam Banyu Biru. Untuk melihat hambatan yang terjadi di wisata pemandian alam Banyu Biru peneliti menggunakan teori dalam Oka A. Yeti (1997) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah di capai (*accessibility*) dan fasilitas (*amenities*).

PENUTUP

Kesimpulan: Berdasarkan pembahasan dari bab-bab diatas maka penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari pembahasan secara keseluruhan. Saran yang diberikan mungkin bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan peran penduduk sekitar dan pengelola wisata pemandian Alam Banyu Adapun kesimpulan dari pembahasan antara lain:

1. Pemandian alam Banyu Biru merupakan situs pemandian yang dijadikan sebagai salah satu obyek daya tarik wisata. Keberadaan pemandian alam Banyu Biru

saat ini merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Kebijakan pengembangan telah diupayakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan beserta Koordinator pemandian alam Banyu Biru, upaya yang dilakukan sudah cukup baik, namun mengalami beberapa hambatan dalam memaksimalkan potensi wisata Banyu Biru.

2. Evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan beserta koordinator pemandian alam Banyu Biru masih belum terlalu signifikan. Adanya pengembangan fisik di area wisata yang dirasa kurang efektif.

Saran

Dengan adanya kekurangan yang ditemui dalam evaluasi kebijakan maka penulis akan menyajikan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan berbagai masalah berkaitan dengan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Saran tersebut antara lain :

1. Evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan wisata pemandian alam Banyu Biru yang sudah direncanakan mampu berjalan secara optimal, untuk upaya pembangunan perlu dilakukan peninjauan ulang dengan mempertimbangkan segala aspek, baik itu dari segi manfaat serta segi keamanan.
2. Strategi pengembangan dan strategi pelestarian dalam pengembangan objek wisata banyubiru perlu dilakukan untuk akses jalan raya menuju lokasi objek wisata. Dan hal ini perlu mendapatkan perhatian.

3. Agar objek wisata Banyubiru dikenal oleh masyarakat luas perlu dikembangkan sarana promosi yang efektif seperti facebook, instagram, youtube dan lain sebagainya.
4. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu segera mensosialisasikan proses pengembangan pengembangan objek wisata pemandian Banyubiru pada masyarakat terdampak sehingga diharapkan kedepan objek wisata akan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yoeti, Oka .(1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa, Bandung.
- Danamik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR ugm dan Andi.
- Iskandar. 2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Referensi.
- Munir, Badrur. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. NTB: BAPPEDA
- Nyoman S. Pendit. (2006). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Edisi Terbaru. Jakarta. PT. Pradaya Pramita.
- Pitana, I G., Gayatri, PG. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi: Yogyakarta.
- Soebagyo. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Liquidity Vol 1 No 2, Juli-Desember 2012, Hal 153-158*. Jakarta: FE Pancasila
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriadi, Edy. 2007. *Telaah kendala penerapan pengembangan ekonomi lokal: pragmatisme dalam praktek pendekatan PEL*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18 (2): 103-123*
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Spillane J.J,1987,*Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius,150 halaman
- Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata*

Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yoeti, Oka A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.